

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 235
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, ( Jakarta: Kompas Gramedia, 2006) Hal. 85.
- Wibowo Gunawan, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan*. Direktorat Jendral Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, 1998. Hlm. 86.
- Nur Fadhilah, dkk. *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018), hal. 14.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Cet 8, h. 124.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hal. 62
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 369
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 149-152
- Dirjen Bina Marga (Direktorat Jendral Bina Marga). 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*, Departemen Pekerjaan Umun, Jakarta, 1–6.
- Utama, Yos Johan (2014). *Hukum Administrasi Negara (PDF)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. hlm. 1.36. ISBN 9789790119208.
- Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990* Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990. Hlm.
- Rachbini, J, Didik, dan, Hamid, Abdul, *Ekonomi Informal Perkotaan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 8.
- Komaruddin .(2002). *Manjemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 3.
- Edrisky, I. F., Dinata, M. R., Putri, A., & Sulistiyawati. (2022). *Pengantar Sosiologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Hal 4,7.

Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan kepemimpinan Pemerintahan, Pendekatan Budaya, Moral dan Etika. Jakarta: Gramedia. Cet. 1. Hal, 38.

## **JURNAL**

Pattisinai, A. R., & Widayanti, F. R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada Pelayanan Strategis Berskala Nasional di Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 5(1).

Hanik Mujiati, S. (2013). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun. *Indonesian Journal on Computer Science - Speed (IJCSS) FTI UNSA*, 9330(2)

Tan, Yulia, 2013. Metode Penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif Adalah Pendekatan Yang Menelaah Hukum. <https://docplayer.info/52868151-I-metodepenelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalahpendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>. 2018.

Akib, Haedar Muhammad. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 1–11.

*Jurnal Hukum Unsulbar Issue No.1 vol.1, April 2018 Diterbitkan oleh rogram Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat.*

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUNA" oleh Wa Ode Nur Aisyah, dkk. Jurnal ini diterbitkan di *Journal Publicuho*, Volume 7 No 4, 2024.

Muhammad Ilham Effendy "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BERAU" *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020, 8 (1): 289-298

Rinawati, Evi, Maryani. "Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat". *JOM FISIP* vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018,

Sofyan Nugroho; Parsudi Suparlan, Penjagaan keteraturan sosial dikawasan simpang lima oleh satuan Samapta Polwiltabes Semarang 1938-2007

Muh. Hasrul, Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah, (Amanna Gappa, 2017), Vol.25 No.2, h. 62.

Dahlansae (2023-03-11). "Pamenang, Nama Baru Ibu Kota Kediri Menggeser Pare". *pwmu.co*. PT Surya Media Jatim. M Sholahudin (2023-02-24). "Ini Alasan Pamenang Jadi Nama Ibu Kota Kabupaten Kediri". *JAWA POS*

- Rizka Mutiarani IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI FULL DAY SCHOOL PADA PEMBELAJARAN SOSIOLOGI SMAN PONTIANAK. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/32022/756765> 80576 diakses pada 07 Juli 2025
- Wibowo Gunawan, MSP, Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 1988
- Jurnal Hukum Unsulbar Issue No.1 vol.1, April 2018 Diterbitkan oleh rogram Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat.
- Muhammad Ilham Effendy “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BERAU” eJournal Ilmu Pemerintahan, 2020, 8 (1): 289-298
- Victor Imanuel W Nalle. (2016). Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.47, No.3, h.385.
- Ari Kurniawan Putra. (2017). Studi Kewenangan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014- 2016. JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, h.6-7.
- Hasyim, M. 2011. Definisi Pedagang Kaki Lima. (Online). (<http://id.shvoong.com/socialsciences/sociology/2205244-definisi-pedagang-kaki-lima/#ixzz2PwOSw7Pm.html>), diakses pada 9 April 2013 pukul 12.20 WIB).
- Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial oleh Satpol PP Sovia Hasanah, S.H. Si Pokrol
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- Lasahido, Adibah Amintasria, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, ISSN (e) : 2527–564X / ISSN (p) 2621-0746, <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>. Diakses pada juli 2023.
- B Adji Murtomo Fungsi Jembatan Penyeberangan Di Pasar Bulu Ditinjau Dari Pejalan Kaki. Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman 6 (2), 70-78, 2007.
- Nur Nidlomatus Silmi, Jati Nugroho, dan Mochammad Zamroni,” KAJIAN HUKUM TERHADAP PROSEDURAL ALIH FUNGSI JALAN

MENJADI KAWASAN PERPINDAHAN KOMERSIAL PUSAT JAJANAN RAKYAT LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,”  
journal (STIH), Vol. 01.NO. 01, Desember 2024

## **WEBSITE**

Pemerintah Kota Kediri, Kantor Satpol PP Kota Kediri  
<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/satpol-pp-kabupaten-kediri-tempati-kantor-baru> diakses pada 07 Juli 2025.

Jatimprov, Visi dan Misi Satpol PP <https://satpolpp.jatimprov.go.id/page/visi>  
diakses pada tanggal 07 Juli 2025.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Tugas dan Fungsi Satpol PP <https://satpolpp.kemendagri.go.id/page/read/tugas-dan-fungsi>  
diakses pada tanggal 07 Juli 2025.

Pemkot Kediri, Peta Kota <https://kedirikab.bps.go.id/id/publication/2018/08/16/d4b0e0d1071951e7a5bf52df/kabupaten-kediri-dalam-angka-2018.html>  
diakses 07 Juli 2025.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 13 ayat 1 PERDA Kabupaten Kediri No 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Baca juga: Pengertian Peraturan Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

Peraturan bupati kediri nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten kediri.

PERDA Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional. Jakarta, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 se-bagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-un-dangan.

Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, PERDA Nomor 04 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (23).

Anonim.2018,Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja.

Pasal 51 ayat (1) Perda Nomor 3 tahun 2019.

Pasal 7 Huruf C Peraturan Daerah Kota Kediri No 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Terkait Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 3 Tahun 2022.

Perda kab. Kediri No 6 tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pub. L. No. 16 (2018).

Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Pasal 11 dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Bupati (PERBUB) Nomor 3 Tahun 2022.

Perda kab. Kediri No 6 tahun 2007.

## **WAWANCARA**

Wawancara Dengan Bapak Yusuf Perwakilan Dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah. Kantor SATPOL PP kota Kediri 15 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Gesang penjual Jalanan Pedagang Kaki Lima di jalan PK Bangsa. 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Yahya Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Joyoboyo. 17 Mei 2025.

Wawancara bersama Bapak Ismail sebagai Perwakilan dari Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kantor SATPOL PP kota Kediri. 15 Mei 2025.

Wawancara bersama Bapak Ahmad PKL di Jembata Lama Kediri. 17 Mei 2025